

ABSTRAK

Penelitian ini membahas potensi pelanggaran dalam proses penunjukan langsung anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Tlagah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPPS berperan penting dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 3 Tahun 2018, pemilihan anggota KPPS seharusnya dilakukan melalui seleksi terbuka yang menekankan pada kompetensi, integritas, dan kemandirian. Namun di Desa Tlagah, proses penunjukan dilakukan secara langsung tanpa mengikuti prosedur yang diatur, yang menimbulkan potensi pelanggaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan langsung KPPS di Desa Tlagah melanggar peraturan yang berlaku dan dapat diganggu sebagai pelanggaran administrasi pemilu, yang berdampak pada keabsahan dan kualitas penyelenggaraan pemilu di desa tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat dalam proses rekrutmen anggota KPPS serta pentingnya pelatihan yang memadai bagi petugas KPPS untuk meningkatkan profesionalisme mereka.

Kata kunci : Pemilu, KPPS, Penunjukan Langsung, Pelanggaran Administrasi, Desa Tlagah.

ABSTRACT

This research discusses potential violations in the process of directly appointing members of the Voting Organizing Group (KPPS) in Tlagah Village during the 2024 General Election (Pemilu). KPPS plays an important role in ensuring the implementation of honest, fair and transparent elections. Based on Article 59 paragraph (2) Law no. 7 of 2017 and General Election Commission (KPU) Regulation no. 3 of 2018, the selection of KPPS members should be carried out through an open selection that emphasizes competence, integrity and independence. However, in Tlagah Village, the appointment process was carried out directly without following regulated procedures, which created potential violations and reduced public confidence in the election results.

This research uses a sociological juridical method with a descriptive-analytical approach. Data was obtained through literature study and interviews with related parties. The research results show that the direct appointment of KPPS in Tlagah Village violates applicable regulations and can be considered a violation of election administration, which has an impact on the legitimacy and quality of election implementation in that village. This research recommends stricter supervision in the recruitment process for KPPS members as well as the importance of adequate training for KPPS officers to increase their professionalism.

Keywords: Election, KPPS, Direct Appointment, Administrative Violations, Tlagah Village.